

Wamenag Ajak IKA PMII Kampanyekan Moderasi Beragama

Pontianak (Kemenag) --- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengajak Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ikut mengkampanyekan moderasi beragama, utamanya di kalangan mahasiswa dan civitas akademika kampus.

Dikatakan Wamenag, sejak beberapa tahun, Kementerian Agama terus mengkampanyekan dan mengembangkan sikap moderasi beragama.

“IKA PMII diharapkan perannya dalam berbangsa bernegara, terlebih Kemenag saat ini sedang mengembangkan Moderasi Beragama,” ulang Wamenag saat menghadiri Pelantikan dan Dialog Publik, Pengurus Wilayah IKA PMII Kalimantan Barat Periode 2019-2024, Pontianak, Jum’at (10/01). Iktu mendampingi, Kakanwil Kemenag Kalbar Ridwansyah.

Wamenag Zainut Tauhid saat memberikan selamat pada Ketum Pengurus Wilayah IKA PMII Kalbar, Suib, Periode 2019-2024 (foto: Arief)

Wamenag berkisah bahwa dirinya juga pernah menjadi warga besar PMII walau hanya sampai pada pengurus cabang, sebagai ketua Komisariat PMII di Tanjung Priok. Selajutnya, Zainut Tauhid mengembangkan sayap organisasinya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

“Tolong dicatat, agar saya diakui sebagai alumni PMII. Walau Saya lama di IPNU, dua Periode di IPNU Pusat,” kata Zainut.

Zainut menjelaskan, dalam Renstra Kemenag sekarang, salah satu program kebijakan utamanya adalah membangun moderasi beragama. Maksudnya, meletakkan praktik keagamaan dalam pososi yang tawasut, moderat, atau di tengah-tengah.

Menurut Zainut, pemahaman yang mengarah pada radikalisme mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara beberapa tahun terakhir. Menjadi tugas Kemenag dan masyarakat untuk membentengi anak bangsa dari paham yang ekstrem dan radikal. Sikap radikal ini bisa lahir karena berbagai aspek, baik persoalan ekonomi, politik, dan sosial, juga faktor pemahaman keagamaan yang keliru. *Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi A Halim Iskandar (pegang mic) (foto: Arief)*

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi A Halim Iskandar yang juga turut hadir menyampaikan bahwa sekarang saatnya semua warga bangsa, terlebih kaum muda dan generasi intelektual, sudah tidak lagi bicara kelompok-kelompok.

“Yang penting hari ini adalah kita membangun bangsa Indonesia lebih cepat, lebih maju, agar semakin baik dan semakin besar,” kata Halim Iskandar.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku bangga atas dilantiknya IKA PMII di bumi khatulistiwa. Karena, selama ini pegerakan mahasiswa ini sudah banyak berkontribusi dalam kemajuan masyarakat di Kalimantan Barat.

“Mari terus kita jaga komunikasi yang baik, untuk membangun Kalimantan Barat. Kuasai data, karena tanpa menguasai data kita tidak bisa bekerja baik sesuai yang diinginkan bersama,” pesan Sutarmadji. Ketua Umum PB IKA PMII KH Akhmad Muqowam mengucapkan terimakasih atas hadirnya Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi A Halim Iskandar pada acara pelantikan IKA PMII ini.

<https://kemenag.go.id/berita/read/512555/wamenag-ajak-ika-pmii-kampanyekan-moderasi-beragama>

Sumber : -

Penulis : M Arif Efendi

Kemenag Cabut Izin 11 Penyelenggara Umrah

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim menegaskan sanksi pencabutan izin diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, ke-11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW).

Padahal, sertifikasi BPW bagi PPIU menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Menurut Arfi, Pasal 48 ayat (4) PMA 8/2018 mengatur, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, PPIU wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pada ayat (5) diatur sanksi izin operasionalnya sebagai PPIU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan, izin operasionalnya dicabut,” tegas Arfi di Jakarta, Jumat (10/01).

Sejak terbit PMA 8 Tahun 2018, PPIU diberikan waktu satu tahun untuk melakukan sertifikasi sebagai BPW. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Regulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi BPW.

Berikut data 11 PPIU yang dicabut izinnya:

1. PT. Madani Mitra Mulia,
2. PT. Kayangan Mandiri Utama,
3. PT. Witami Prabuwana Cipta,

4. PT. Arhas Bugis Tour & Travel,
5. PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana,
6. PT. Alharam Wisata Illah,
7. PT. Hijau Tumbuh Kembang,

8. PT. Fahmul Fauzy,
9. PT. Kalam Imran Farok Tours,
10. PT. Praba Arta Buana Utama, dan
11. PT. Fatuha Amanah Wisata Insani.

Sumber : Siaran Pers

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512554/kemenag-cabut-izin-11-penyelenggara-umrah>



Awal 2020, Siswa MAN 1 Kudus Ikuti Kompetisi Riset Nasional dan Internasional

Kudus (Kemenag) --- Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus akan mengirimkan tim pada ajang kompetisi riset nasional dan internasional yang akan dilaksanakan sepanjang Februari hingga Mei 2020.

“Memasuki tahun 2020, MAN 1 berupaya untuk meningkatkan prestasi di bidang riset dengan mengirimkan siswa-siswa berprestasi diajang lomba internasional dan nasional,” ungkap Kepala MAN 1 Kudus Suhamto, Jumat (10/01).

Pengiriman tim ini menurutnya merupakan salah satu komitmen MAN 1 Kudus untuk mewujudkan madrasah berbasis riset, sains dan inovasi. Suhamto menuturkan, madrasah yang dipimpinnya memiliki program *Science and Innovation Program* (SIP).

“Saya bersyukur, siswa-siswa MAN 1 Kudus memiliki motivasi kuat untuk meningkatkan minat dan prestasi dibidang riset melalui program SIP ini,” paparnya.

Tim yang akan dikirim menurut Suhamto merupakan siswa-siswa berprestasi yang telah mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama pada tahun 2019. “Bersyukur dengan bantuan tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih berprestasi,” jelas Suhamto.

Adapun tim yang akan dikirim, meliputi tiga tim untuk mengikuti ajang kompetisi riset internasional, dan dua tim untuk ajang nasional. Berikut rinciannya:

1. *Thailand Inventor's Day* (TID): Indra Faizatun Nisa', Novila Dwi Candra, Alfi Fatimatuz Zahro, Pembimbing Nurul Khotimah dengan judul “*ARASS : Agroforestry Analogue Rice Combined with Seagrass Seeds (Enhalus acoroides) The Prevention of Free Radicals as Healthy Rice Innovation*”;
2. *Asian Youth Innovation Awards* (AYIA) - Malaysia Technology Expo (MTE): Laila Fitriya Muthoharoh, Faliha Ibriza Tsaniya, Nilen Ayu Khoirun Nisa, Pembimbing Arif Noor Adiyanto dan Ahmad Edi Darmawan dengan judul: “*E-NYOCAF: Edible Film With Ganyong Flour (Canna Discolor) And Mocaf Flour (Dried Cassava Flour) Based On Glycerol Plasticizer As Biodegradable Packaging Innovations*”;
3. *International Science and Engineering Fair* (ISEF): Azzalira Alaiyya Zahwa dan Fifi Munasaroh dengan judul: *Edible Film from Microalgae and Mangrove Leaf Litter Based on Glycerol Plasticizer as Biodegradable Packaging Innovation*;
4. *Indonesian Sains Project Olimpiad* (ISPO): Indra Faizatun Nisa' dan Novilla Dwi Candra dengan judul: “*BABL-CAF*” Beras Analog Dari Biji Lamun (*Enhalus acoroides*), Latoh (*Caulerpa* sp.) dan Mocaf Kaya Antioksidan Sebagai Sumber Makanan Pokok Sehat Masa Kini;
5. *Indonesian Sains Project Olimpiad* (ISPO): Rima Distriani dan Dhea Puspitasari dengan judul: “*KALI MERA*” Karbon Aktif dari Lidah Mertua (*Sansevieria*) dan Ampas Tebu (*Saccharum Afficinarum* L) sebagai Adsorben Gas Amonia pada Kandang Ayam Berbasis Arduino. (Agus)

Sumber : MAN 1 Kudus

<https://kemenag.go.id/berita/read/512553/awal-2020--siswa-man-1-kudus-ikuti-kompetisi-riset-nasional-dan-internasional>

Bina ASN Kalbar, Wamenag Ingatkan Perbedaan dalam Kesatuan

Pontianak (Kemenag) --- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi memberikan pembinaan kepada ASN Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Wamenag berpesan agar ASN Kementerian Agama dapat menerima perbedaan dalam kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita harus menerima perbedaan di dalam sebuah kesatuan, begitu juga kita satu dalam sebuah perbedaan. Baik itu berbeda dalam agama, ras, ekonomi, dan termasuk juga perbedaan politik. Tidak sewajarnya perbedaan agama dan tafsir agama menjadi perpecahan di antara kita," pesan Wamenag Zainut Tauhid di Pontianak, Jum'at (10/01).

Menurut Wamenag, menjadi aparatur sipil negara adalah sebuah kehormatan. Karenanya, ASN harus berkontribusi dalam pembangunan agama. "Betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak ibu sebagai deliver dalam pembangunan bangsa dan negara," lanjutnya.

Wamenag mengatakan, setiap agama punya-prinsip dan panduan yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Agama mengajarkan pemeluknya agar bisa hidup nyaman berdampingan, rukun dan damai, meski nyatanya punya perbedaan. "Kita harus belajar dari negara lain yang luluhlantak karena tidak dapat menjaga keragaman. Alhamdulillah, Indonesia bisa memelihara semangat nasionalisme dan perbedaan," kata Wamenag.

"Perbedaan menjadi kekuatan, indah, aman, dan berwarna. Kalau satu warna, pasti nampak tidak indah dipandang mata. Itulah Indonesia yang harus dirawat bersama dengan macam warnanya," lanjutnya.

Dikatakan Wamenag, Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir terus menggerakkan moderasi beragama. Sikap moderat menjadi pilihan terbaik dalam menguatkan relasi agama dan negara. "Antara nilai agama dan kebangsaan tidak bisa dipertentangkan, karena keduanya saling melengkapi, membangun dan menghantarkan rakyat Indonesia yang sejahtera, penuh kedamaian dan sayang satu sama lain," tandasnya.

Kakanwil Kemenag Kalbar Ridwansyah berterima kasih atas kehadiran Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi. Ridwansyah melaporkan bahwa Kanwil Kalbar memiliki 3.367 pegawai yang tersebar di 12 kabupaten dan 2 kotamadya.

Menurut Ridwansyah, kerukunan umat beragama di bumi Khatulistiwa selama ini terjadi baik. Bahkan, Singkawang dijadikan sebagai Kota Kerukunan.

Secara geografis Kalimantan Barat memiliki lima titik perbatasan dengan luar negeri, yaitu: Sambas, Bengkayang, Sanggau, Tumbang, dan Sintang.

"Ini lima titik perbatasan kita. Dan menjadi tempat lalu hilirnya para Tenaga Kerja ke luar negeri," kata Ridwansyah. Persoalan yang dihadapi di Kalbar, utamanya di daerah perbatasan adalah TKW yang menikah sirri, dan akses pendidikan yang minim. Untuk itu, Kanwil Kemenag Kalbar menggalakkan program penguatan madrasah di perbatasan.

"Kita sedang menata program prioritas dalam pengembangan madrasah dan pesantren di perbatasan. Nantinya anak-anak TKW bisa dititipkan dan menimba ilmu pengetahuan pada madrasah dan pesantren di perbatasan," tambah Ridwansyah. Pembinaan ASN ini diikuti oleh seluruh Kankemenag Kabupaten/Kota dan ASN Kanwil Kemenag Kalbar.

Sumber : -

Penulis : M Arif Efendi

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512552/bina-asn-kalbar--wamenag-ingatkan-perbedaan-dalam-kesatuan>

Kemenag Kembali Gelar Syiar Anak Negeri, Ajang Kompetisi Siswa MA

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama kembali menggelar Program Syiar Anak Negeri untuk ketiga kalinya pada 2020 ini. Syiar Anak Negeri merupakan ajang pencarian bakat remaja untuk berdakwah, baik melalui syiar maupun syair. Ajang ini menguji bakat peserta dalam penyampaian khotbah/ceramah, dongeng islami, dan juga nasyid.

Sama seperti dua gelaran Syiar Anak Negeri terdahulu, Kemenag kembali menggandeng Media Group sebagai partner. Kesiapan Media Group untuk terlibat dalam kegiatan ini disampaikan Chief HRD Media Group News Avi Pranantha saat bertemu Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Ini tahun ketiga kami menyelenggarakan program syiar anak negeri. Program syiar dan syair ini merangkul siswa Madrasah Aliyah (MA), dan tanggapannya sungguh luar biasa,” kata Avi, Jumat (10/01).

Menurut Avi, program yang digawangi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kemenag ini, pada 2020 akan membuka seleksi di enam kota besar di Indonesia.

“Seleksinya akan merambah ke enam kota besar yakni Banjarmasin, Semarang, Makassar, Bandung, Surabaya dan Medan,” jelas Avi.

Bersama Avi, turut hadir CEO Media Group Mohamad Mirdal Akib beserta jajarannya. Mirdal menyampaikan, selain Syiar Anak Negeri, Media Group juga siap untuk mengawal program-program Kemenag lainnya.

“Kita akan terus mengawal program program kementerian agama khususnya tentang toleransi antar umat beragama. Juga mempersiapkan program program termasuk ekonomi umat, ekonomi syariah agar supaya potensi yang besar itu bisa terealisasi dengan real,” kata Mirdal. “Ini menjadi salah satu komitmen Media Group. Ini sudah dijalankan Media Group bagaimana hubungan antar umat beragama berjalan harmonis,” tandasnya.

Menag Fachrul Razi mengapresiasi keterlibatan Media Group dalam publikasi maupun penyelenggaraan program terkait kerukunan umat beragama di Indonesia. “Terima kasih selama ini Media Group telah mensupport Kementerian Agama dengan program-program khususnya” ucap Menag.

Menag berharap hal semacam ini pun dapat ditiru oleh media lainnya. “Tidak hanya program peringatan hari besar keagamaan, tapi juga program yang menunjukkan prestasi-prestasi siswa madrasah,” harap Menag.

Sementara, terkait program Syiar Anak Negeri, Menag berharap pemenangnya dapat memiliki kesempatan untuk tampil di Istana Negara. “Saya berharap mereka yang juara bisa menunjukkan kemampuannya di Istana pada saat peringatan keagamaan,” kata Menag.

Hadir mendampingi Menteri Agama, Plt. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Ali Rokhmad, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Dirjen Pendis, Umar dan Sekretaris Menteri Agama Khoirul Huda.

Sumber : - <https://kemenag.go.id/berita/read/512551/kemenag-kembali-gelar-syiar-anak-negeri--ajang-kompetisi-siswa-ma>

Penulis : Ruwaidah

Penyuluh Agama Islam Salurkan Bantuan Terdampak Banjir Lebak Banten

Lebak (Kemrenag) --- Penyuluh Agama Islam bersama Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor di Lebak, Banten. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 30 karung dan diserahkan di Kankemenag Kab Lebak, Kamis (09/01).

Bantuan ini berasal dari para penyuluh agama Islam se Indonesia. Bantuan diserahkan oleh Kasubdit Kepenyuluhan Dasma kepada Ujang Zarkasyi selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Ikut menyaksikan, Amirulla Kasi Kepenyuluhan Ditpenais, Baban Bahtiar Kasi Bimas Islam, Perwakilan Penyuluh Agama Islam Sriwanti (Jatim) Naif Adnan (DKI Jakarta).

Bantuan ini juga ditujukan untuk Penyuluh Agama Islam Honorer Kab Lebak yang terdampak banjir.

Menurut Dasma, bantuan ini bukan pertama kali dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Sebelumnya, bantuan pernah juga diberikan kepada korban tsunami Pandeglang dan Palu tahun lalu.

“Alhamdulillah terkumpul lima belas juta rupiah dan kami akan selalu berusaha membantu saudara-saudara kami yang mengalami musibah dimana saja,” ujar Dasma

Kabid Penais Kanwil Kemenag Banten mengucapkan terimakasih kepada Penyuluh Agama Islam atas perhatian dan bantuannya. Dia berharap bantuan ini bisa didistribusikan kepada korban bencana banjir meliputi pengajian dan majelis taklim.

Selain bantuan makanan, penyuluh agama Islam juga turun ke tenda-tenda pengungsi untuk memulihkan secara psikologis derita yang dialami para korban dengan memberikan motivasi.

Pengajian untuk anak-anak korban banjir juga tetap dilanjutkan.

Sumber : Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Nasional

Penulis : Romadanyl

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512556/penyuluh-agama-islam-salurkan-bantuan-terdampak-banjir-lebak-banten>



Kemenag: Biaya Haji 2020 Ditetapkan Awal Februari

HRAM.CO.ID, JAKARTA -- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020 sudah dibahas di internal Kementerian Agama (Kemenag). Rencananya BPIH akan ditetapkan pada awal Februari 2020 setelah rapat dengar pendapat dan rapat kerja.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu pada Kemenag Maman Saepulloh mengatakan, Kemenag akan dilakukan konsinyering membahas BPIH pada 15-17 Januari 2020. Kemudian pada 18 Januari 2020, Kemenag akan melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk survei dan melihat perumahan, katering, transportasi dan yang lainnya.

"Setelah itu pulang dari Arab Saudi rencananya pada 2 Februari akan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja, kemudian diputuskanlah BPIH itu," kata Maman kepada *Republika.co.id*, Ahad (12/1).

Ia menyampaikan, sesuai dengan arahan menteri agama (menag), tahun ini menginginkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau direct cost tidak naik. Bipih 2020 minimal sama dengan Bipih 2019, yakni sebesar Rp 35.235.602.

Namun, ia menambahkan, penentuan BPIH dan Bipih tergantung nanti hasil rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR RI. Di samping itu BPIH dan Bipih 2020 juga tergantung dengan masukan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Besaran Bipih akan disesuaikan dengan nilai manfaat yang diperoleh BPKH.

"Kalau perolehan nilai manfaat tahun ini (oleh BPKH) besar, kemungkinan (Bipih) tidak naik, tapi kalau nilai manfaat yang diperoleh tahun ini tidak terlalu besar bisa jadi hal-hal lain akan dikurangi, misalnya biaya living cost yang dulunya 1.500 Riyal menjadi 1.000 Riyal," ujarnya.

Maman juga menerangkan, kalau harga tiket pesawat lebih rendah dari tahun lalu Insya Allah Bipih akan sama dengan tahun 2019. Namun tergantung nanti hasil negosiasi harga tiket pesawat. Rencananya pekan depan akan negosiasi harga tiket pesawat.

Ia juga menyampaikan, harga avtur dan Dolar sedang turun. Apakah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar hanya turun di Januari saja atau benar-benar turun. Hal ini akan dilihat perkembangannya sampai Februari 2020. Sebab penetapan BPIH dan Bipih juga tergantung hasil survei harga hotel, katering dan transportasi di Arab Saudi.

"Kami juga mengusulkan ingin sistem sewa hotel full time, tahun lalu hanya 71 persen hotel yang disewa secara *full time*, tahun ini ingin 80 persen hotel disewa secara *full time*," jelasnya.

Sebab, Maman menjelaskan, kalau sistem sewa hotel secara *block time* akan kerepotan saat jadwal kedatangan atau keberangkatan pesawat meleset. Kalau sistem sewa hotel secara full time, meski jadwal pesawat meleset tidak masalah.

<https://ihram.co.id/berita/q3zorl428/kemenagbiayahaji2020ditetapkanawalfebruari>

Kemenag: Biaya Haji 2020 Ditetapkan Awal Februari

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020 sudah dibahas di internal Kementerian Agama (Kemenag). Rencananya BPIH akan ditetapkan pada awal Februari 2020 setelah rapat dengar pendapat dan rapat kerja.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu pada Kemenag Maman Saepulloh mengatakan, Kemenag akan dilakukan konsinyering membahas

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu pada Kemenag Maman Saepulloh mengatakan, Kemenag akan dilakukan konsinyering membahas BPIH pada 15-17 Januari 2020. Kemudian pada 18 Januari 2020, Kemenag akan melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk survei dan melihat perumahan, katering, transportasi dan yang lainnya.

"Setelah itu pulang dari Arab Saudi rencananya pada 2 Februari akan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja, kemudian diputuskanlah BPIH itu," kata Maman kepada *Republika.co.id*, Ahad (12/1).

Ia menyampaikan, sesuai dengan arahan menteri agama (menag), tahun ini menginginkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau direct cost tidak naik. Bipih 2020 minimal sama dengan Bipih 2019, yakni sebesar Rp 35.235.602.

Namun, Ia menambahkan, penentuan BPIH dan Bipih tergantung nanti hasil rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR RI. Di samping itu BPIH dan Bipih 2020 juga tergantung dengan masukan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Besaran Bipih akan disesuaikan dengan nilai manfaat yang diperoleh BPKH.

"Kalau perolehan nilai manfaat tahun ini (oleh BPKH) besar, kemungkinan (Bipih) tidak naik, tapi kalau nilai manfaat yang diperoleh tahun ini tidak terlalu besar bisa jadi hal-hal lain akan dikurangi, misalnya biaya living cost yang dulunya 1.500 Riyal menjadi 1.000 Riyal," ujarnya.

Maman juga menerangkan, kalau harga tiket pesawat lebih rendah dari tahun lalu Insya Allah Bipih akan sama dengan tahun 2019. Namun tergantung nanti hasil negosiasi harga tiket pesawat. Rencananya pekan depan akan negosiasi harga tiket pesawat.

Ia juga menyampaikan, harga avtur dan Dolar sedang turun. Apakah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar hanya turun di Januari saja atau benar-benar turun. Hal ini akan dilihat perkembangannya sampai Februari 2020. Sebab penetapan BPIH dan Bipih juga tergantung hasil survei harga hotel, katering dan transportasi di Arab Saudi.

"Kami juga mengusulkan ingin sistem sewa hotel full time, tahun lalu hanya 71 persen hotel yang disewa secara *full time*, tahun ini ingin 80 persen hotel disewa secara *full time*," jelasnya.

Sebab, Maman menjelaskan, kalau sistem sewa hotel secara *block time* akan kerepotan saat jadwal kedatangan atau keberangkatan pesawat meleset. Kalau sistem sewa hotel secara full time, meski jadwal pesawat meleset tidak masalah.

<https://ihram.co.id/berita/q3zorl428/kemenagbiayahaji2020ditetapkanawalfebruari>

Kemenag Susun PMA Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Agama

Jakarta (Kemenag) --- Kemenag akan menyusun Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama.

Hal ini ditegaskan Wamenag Zainut Tauhid Saadi merespon instruksi Presiden Jokowi dalam rangka mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Presiden mencatat, laporan kasus kekerasan pada anak baik kekerasan seksual, emosional, fisik maupun penelantaran mengalami kenaikan signifikan, sebanyak 1.975 laporan di 2015 menjadi 6.820 di 2016.

"Penerbitan PMA tersebut sifatnya mendesak mengingat sampai saat ini di lingkungan Kemenag belum ada regulasi yang mengatur masalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, sementara kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat," terang Wamenag dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/01).

"Sehingga, diharapkan PMA tersebut dapat memberikan panduan kepada para guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak," lanjutnya.

Menurut Wamenag, PMA tersebut setidaknya akan memuat tiga masalah. Pertama, mengoptimalkan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Kedua, membuat sistem layanan pengaduan terkait kasus-kasus anak. Dan ketiga, membangun sistem manajemen informasi penanganan kasus anak menuju penanganan yang lebih komprehensif. Kemenag menargetkan PMA tersebut selesai. "Sehingga dapat segera disosialisasikan," ujarnya.

PMA, kata Wamenag, akan lebih meprioritaskan pada aspek pencegahan. Aksi pencegahan dilakukan dengan berbagai model kampanye, model-model sosialisasi dan edukasi publik, yang bukan hanya menarik tapi memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak.

"Presiden sangat berkomitmen untuk terus mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap masalah kekerasan anak, agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter," tandasnya.

Sumber : Siaran Pers

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512558/kemenag-susun-pma-pencegahan-kekerasan-anak-di-satuan-pendidikan-agama>



Kemenag cabut izin 11 penyelenggara umrah, berikut daftar lengkapnya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sertifikasi sebagai biro perjalanan wisata (BPW). Ke-11 PPIU itu tidak melakukan sertifikasi hingga waktu yang ditentukan.

"Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan, izin operasionalnya dicabut," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim dalam siaran pers, Senin (13/1).

Baca Juga: Upayakan kembalikan aset First Travel kepada korban, Kejaksaan Agung tunda lelang

Sertifikasi BPW menjadi syarat bagi PPIU seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. PPIU memiliki waktu satu tahun setelah PMA disahkan untuk mengurus sertifikasi BPW.

Berikut data 11 PPIU yang dicabut izinnya:

1. PT. Madani Mitra Mulia,
2. PT. Kayangan Mandiri Utama,
3. PT. Witami Prabuwana Cipta,
4. PT. Arhas Bugis Tour & Travel,
5. PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana,
6. PT. Alharam Wisata Illah,
7. PT. Hijau Tumbuh Kembang,
8. PT. Fahmul Fauzy,
9. PT. Kalam Imran Farok Tours,
10. PT. Praba Arta Buana Utama, dan
11. PT. Fatuha Amanah Wisata Insani.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 ada 18 PPIU yang dicabut izinnya. Selain itu ada pula 8 PPIU yang tidak bisa memperpanjang izin karena masalah akreditasi serta lima yang tidak dapat memperpanjang karena hasil pengawasan. Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Noer Alya Fitra menambahkan, sertifikasi merupakan bukti PPIU profesional. Sehingga dapat meminimalisir potensi penyelenggara ibadah umroh yang ilegal.

Guna meminimalisir itu, Kemenag juga dengan kementerian dan lembaga lain membentuk Satgas pengawasan umroh. Satgas itu dinilai efektif menghilangkan PPIU ilegal. "Sampai saat ini sudah berjalan kemarin penertiban travel tidak berizin di daerah," terang Noer saat dihubungi Kontan.co.id.

Oleh karena itu Noer bilang Satgas tersebut akan terus dilanjutkan. Satgas juga menggaet kepolisian untuk menertibkan PPIU ilegal yang tidak berizin. Pada Undang Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh PPIU yang tidak memiliki izin pemberangkatan. Bila hal tersebut dilakukan maka akan menjadi ranah pidana.

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenag-cabut-izin-11-penyelenggara-umrah-berikut-daftar-lengkapnya>

Indonesia & UEA Sinergi dalam Promosi Moderasi Beragama

Abu Dhabi (Kemenag) --- Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menjalin kerjasama dalam urusan agama Islam dan wakaf. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Agama Fachrul Razi dan Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf UEA Mohammed bin Matar al Kaabi.

Penandatanganan MoU ini berlangsung di Istana Kepresidenan Qasr al-Wathan, Abu Dhabi, Minggu (12/01). Ikut menyaksikan, Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Shaikh Muhammed Ben Zayed (MBZ). Hadir juga, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan Tim KBRI di Abu Dhabi.

"Alhamdulillah, saya beserta Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf UEA Mohammed bin Matar al Kaabi telah menandatangani MoU tentang urusan agama Islam. Penandatanganan MoU ini dilakukan dalam kesempatan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Crown Prince Muhammed Bin Zayed (MBZ) di istana kepresidenan Qasr al-Watan, Abu Dhabi," terang Menag Fachrul di Abu Dhabi, Minggu (12/01).

"Salah satu poin penting sinergi ini adalah promosi moderasi beragama dan bahaya ekstrimisme," sambungnya. Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan yang hadir mendampingi Menag menjelaskan, ada sejumlah isu kerja sama bilateral antara Indonesia dan UEA yang terkait urusan agama Islam dan Wakaf. Pertama, pertukaran pengalaman dan keahlian untuk mempromosikan konsep-konsep moderasi beragama, nilai-nilai toleransi, dan meningkatkan kesadaran publik dalam menghadapi bahaya ekstremisme.

Kedua, pengembangan kapasitas imam, khatib, dan mufti melalui berbagi praktik terbaik. Ketiga, pertukaran keahlian di bidang penghafalan Al Qur'an, pembacaan dan terjemahan Al-Qur'an dan Sunnah. Keempat, pertukaran pengalaman di bidang manajemen wakaf, pengembangan dan investasinya. Kelima, bertukar cetakan, publikasi, dan terjemahan Kitab Suci Al Qur'an serta hasil cetakan, hasil penelitian, publikasi, dan majalah.

Keenam, pertukaran keahlian dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan masjid yang bertujuan untuk mempromosikan masjid sebagai tempat ibadah dan bimbingan keagamaan moderat yang aman. "Terakhir, pertukaran delegasi dan peserta di semua tingkatan dan partisipasi pada forum, konferensi, dan Musabaqah Al-Quran," ujarnya.

Hal lain yang akan dibicarakan adalah terkait rencana bantuan hibah (grant) Pemerintah UEA berupa pembangunan fisik Grand Mosque Muhammad bin Zayed di Solo, Jawa Tengah. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen UEA bersama RI untuk membangun masjid yang ramah bagi semua orang dan penyebaran Islam wasathiyah dan moderasi beragama.

"Kita juga akan menjalin kerjasama dalam penguatan e-learning madrasah," tandasnya. Menag beserta jajarannya dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air pada Selasa (14/01) mendatang.

Sumber : Siaran Pers

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512559/indonesia---uea-sinergi-dalam-promosi-moderasi-beragama>

Wamenag Harap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tingkatkan Kemandirian

Jakarta (Kemenag) --- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus terus meningkatkan kemandirian dengan mengembangkan unit-unit usaha produktif. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid saat menerima kunjungan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (YAPTINU) dan civitas akademika Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Wamenag mendorong jajaran Pengurus YAPTINU yang membawahi UNISNU Jepara untuk menjalin kerjasama dengan banyak kalangan, pengusaha, perbankan dan kementerian/lembaga. "Banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menghidupi dan mengembangkan kampus, salah satunya zakat dan wakaf," katanya di Jakarta, Senin (13/01).

"Banyak potensi zakat dan wakaf yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan tinggi, karenanya sudah waktunya untuk diseriusi," lanjut Wakil Ketua MUI ini.

Wamenag mengapresiasi perkembangan UNISNU dan kiprahnya dalam memperluas akses masyarakat Jawa Tengah khususnya untuk belajar di perguruan tinggi. Namun, Zainut meminta UNISNU untuk memikirkan perluasan lahan kampus. Sebab, lahan akan sangat menentukan masa depan.

"Dengan menjadi universitas tentu tidak cukup kalau baru memiliki lahan seluas 5 Ha perlu dipikirkan rencana jangka panjang terutama tambahan lahan," kata putra kelahiran Jepara ini.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara Imam Ghozali yang turut serta dalam rombongan mengatakan tahun ini pihaknya telah berupaya memfasilitasi UNISNU dengan kalangan perbankan dan badan-badan usaha melalui CSR. Imam yang juga Dewan Penyantun UNISNU meminta agar anggaran yang ada sekitar 2 milyar untuk dimanfaatkan untuk menjalankan usaha produktif bukan untuk pembangunan fisik.

"Saya kepingin dana yang ada digunakan untuk membuka unit usaha agar dapat menopang sejumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa di UNISNU dan juga untuk pengembangan lainnya," katanya.

Kedatangan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (YAPTINU) Jepara meminta kepada Wamenag untuk menjadi salah satu pengurus yayasan. "Kami meminta Bapak Wamenag sebagai putra Jepara untuk berkenan menjadi salah satu pengurus YAPTINU Jepara, agar menambah semangat kami dalam mengembangkan kampus NU ini," kata Ketua Yayasan Shodiq Abdulloh.

Hadir mendampingi Wamenag Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori dan sejumlah staf. "Dalam lima tahun terakhir ini Kemenag melalui Ditjen Pendidikan Islam telah bersinergi dengan UNISNU Jepara salah satunya dalam program Bidikmisi, Sarana Prasarana PTKIS dan Program 5000 Doktor," kata Ruchman. (RB)

Sumber : Ruchman Basori

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512560/wamenag-harap-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-tingkatkan-kemandirian>

Kemenag Siap Gelar Syiar Anak Negeri, Ajang Kompetisi Siswa Madrasah

Moeslimchoice. Syiar Anak Negeri merupakan ajang pencarian bakat remaja untuk berdakwah, baik melalui syiar maupun syair. Tahun 2020 ini ajang Syiar Anak Negeri merupakan yang ketiga kalinya YANG AKAN digelar oleh Kemenag.

Gelaran ini tak lain untuk menguji bakat peserta dalam penyampaian khotbah/ceramah, dongeng Islami, dan juga nasyid. Sama seperti dua gelaran Syiar Anak Negeri terdahulu, Kemenag kembali menggandeng Media Group sebagai partner. Kesiapan Media Group untuk terlibat dalam kegiatan ini disampaikan Chief HRD Media Group News, Avi Pranantha saat bertemu Menteri Agama, Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

"Ini tahun ketiga kami menyelenggarakan program Syiar Anak Negeri. Program syiar dan syair ini merangkul siswa Madrasah Aliyah (MA), dan tanggapannya sungguh luar biasa," kata Avi beberapa waktu lalu.

Menurut Avi, program yang digawangi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kemenag ini, pada 2020 akan membuka seleksi di enam kota besar di Indonesia.

"Seleksinya akan merambah ke enam kota besar yakni Banjarmasin, Semarang, Makassar, Bandung, Surabaya dan Medan," jelas Avi. Bersama Avi, turut hadir CEO Media Group, Mohamad Mirdal Akib beserta jajarannya. Mirdal menyampaikan, selain Syiar Anak Negeri, Media Group juga siap untuk mengawal program-program Kemenag lainnya.

"Kita akan terus mengawal program-program kementerian agama khususnya tentang toleransi antar umat beragama. Juga mempersiapkan program-program termasuk ekonomi umat, ekonomi syariah agar supaya potensi yang besar itu bisa terealisasi dengan real," kata Mirdal.

"Ini menjadi salah satu komitmen Media Group. Ini sudah dijalankan Media Group bagaimana hubungan antar umat beragama berjalan harmonis," tandasnya. Menag Fachrul Razi mengapresiasi keterlibatan Media Group dalam publikasi maupun penyelenggaraan program terkait kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Terima kasih selama ini Media Group telah mensupport Kementerian Agama dengan program-program khususnya," ucap Menag. Menag berharap hal semacam ini pun dapat ditiru oleh media lainnya. "Tidak hanya program peringatan hari besar keagamaan, tapi juga program yang menunjukkan prestasi-prestasi siswa Madrasah," harap Menag.

Sementara, terkait program Syiar Anak Negeri, Menag berharap pemenangnya dapat memiliki kesempatan untuk tampil di Istana Negara. "Saya berharap mereka yang juara bisa menunjukkan kemampuannya di Istana pada saat peringatan keagamaan," kata Menag.

Hadir mendampingi Menteri Agama, Plt. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Ali Rokhmad, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Dirjen Pendis, Umar dan Sekretaris Menteri Agama, Khoirul Huda. [mel]

<https://www.moeslimchoice.com/read/2020/01/13/31497/kemenag-siap-gelar-syiar-anak-negeri-ajang-kompetisi-siswa-madrasah>

Kemenag Susun PMA Pencegahan Kekerasan Anak

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) akan menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama. Nantinya PMA ini akan memuat tiga hal penting yang perlu diperhatikan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menjelaskan, yang pertama adalah mengoptimalkan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Kemudian membuat sistem layanan pengaduan terkait kasus-kasus anak.

Ketiga lanjutnya, membangun sistem manajemen informasi penanganan kasus anak menuju penanganan yang lebih komprehensif. Zainut mengatakan, penyusunan PMA ini merupakan respons terhadap instruksi Presiden Jokowi untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan catatan Jokowi kasus kekerasan terhadap anak ini terus meningkat. Selain itu, ungkap Zainut, PMA ini juga sifatnya mendesak.

Pasalnya selama ini di lingkungan Kemenag belum ada regulasi yang mengatur masalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. "Sementara kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Sehingga, diharapkan PMA tersebut dapat memberikan panduan kepada para guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak," jelas Zainut, dalam siaran persnya, Senin, 13 Januari 2020.

Nantinya PMA akan memprioritaskan pada aspek pencegahan. Dengan kemasam yang beragam sehingga memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak. "Presiden sangat berkomitmen untuk terus mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap masalah kekerasan anak, agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter," terangnya.

(CEU)

<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yNL7Dr9K-kemenag-susun-pma-pencegahan-kekerasan-anak>



Bila Ada Pungli Layanan Haji, Kemenag: Laporkan!

MALANG, RADARBANGSA.COM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika mendapati pungutan-pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait layanan haji.

"Bila terjadi pungli dalam mengurus pendaftaran atau pelayanan dalam layanan ini, segera lapor," tegas Nizar saat meresmikan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Malang, Jawa Timur, Senin 13 Januari 2020.

Menurut Nizar, pembangunan PLHUT bertujuan agar percepatan pelayanan kepada calon jemaah haji dapat diwujudkan melalui sistem satu pintu (*one stop service*).

"Pembangunan PLHUT dinilai sebuah keniscayaan, bagaimana masyarakat membutuhkan dan berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik," jelasnya.

Hadir dalam peresmian, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, Kabid PHU Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Jamal, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Malang Musta'in, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo Achmad Rofi'i, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban Sahid, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jember Busthami.

<https://www.radarbangsa.com/news/22083/bila-ada-pungli-layanan-haji-kemenag-laporkan>



Sertifikasi Halal Gratis Dimatangkan

● IIT SEPTYANINGSIH, ALI YUSUF

Ada berbagai sumber dana yang bisa dimanfaatkan.

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menggratiskan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Kementerian dan lembaga terkait saat ini terus mematangkan sumber dana atau skema subsidi untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hariyanto mengatakan, Kemenkeu bersama kementerian dan lembaga terkait bakal kembali melakukan pertemuan untuk pembahasan skema sertifikasi halal gratis. Pembahasan ini antara lain melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MU), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan tentunya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Segera dibahas lagi agar implementasinya berjalan baik. Mudah-mudahan cepat selesai," kata Andin kepada *Republika*, Ahad (12/1).

Kebijakan membebaskan biaya sertifikasi halal bagi UMK disepakati dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada Rabu (8/1). Rapat itu dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Sertifikasi halal gratis hanya berlaku bagi UMK sektor makanan dan minuman dengan omzet maksimal Rp 1 miliar per tahun. Kebijakan ini diharapkan memudahkan UMK sektor makanan dan minuman mengikuti UU Jaminan Produk Halal.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih menambahkan, Kemenperin juga terlibat dalam pembahasan sertifikasi halal untuk UMK. "Soal penggratisan bagi UMK masih dibahas. Belum selesai," ujar Gati, Ahad.

Sebelumnya, Gati menegaskan, Kemenperin siap memberikan insentif sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah (IKM). Namun, Kemenperin masih menunggu kepastian tarif sertifikasi. Menurut dia, Kemenperin sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif tersebut.

Pengamat ekonomi syariah Institut Pertanian Bogor (IPB), Irfan Syaqui Beik, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi UMK. Namun, untuk mewujudkannya memerlukan dukungan pembiayaan dari berbagai

sumber.

Menurut Irfan, ada beberapa sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai sertifikasi halal UMK. Selain dari APBN, sumber dana bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "APBD provinsi, kabupaten, atau kota bisa didorong dan diwajibkan menganggarkan biaya sertifikasi halal. Katakan itu jadi bagian dari anggarannya Dinas Perindag atau Dinas Koperasi dan UKM," kata Irfan, kemarin.

Sumber kedua, kata Irfan, bisa berasal dari dana *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan besar. Pemerintah bisa mengarahkan perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk membantu UMK mengurus sertifikasi halal.

Irfan mengatakan, dana zakat juga bisa dimanfaatkan selama sasarannya adalah usaha mikro yang dimiliki masyarakat. "Usaha mikro itu, insya Allah, masuk dalam kategori mustahik," ujar dia.

Adapun sumber dana keempat, kata Irfan, bisa berasal dari dana wakaf. Dalam skema ini, UMK menjadi *mauquf alaih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harga wakaf) dari alokasi atau hasil investasi dari aset wakaf yang ada.

Indonesia Halal Watch (IHW)

berpendapat, UMK perlu tetap dikenakan biaya sertifikasi halal meskipun dengan tarif yang sangat rendah. "Sebaiknya tetap dipungut biaya sekalipun Rp 50 ribu per produk agar pelaku usaha menghargai dan tetap memelihara sistem jaminan halal setelah memperoleh sertifikat halal," kata Sekretaris IHW Raihani Keumala, Ahad.

Dia menilai, jika biaya sertifikasi halal digratiskan, para pelaku usaha tidak akan punya rasa memiliki dan kewajiban memelihara sertifikat halal. Menurut dia, hal itu menjadi kontraproduktif dan tidak edukatif.

Raihani mengatakan, ada lebih dari 1,6 juta pelaku UMK yang belum melakukan sertifikasi halal. Negara setidaknya harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 640 miliar per tahun jika ingin membiayai penuh sertifikasi halal bagi UMK.

Ia menyarankan, negara dapat memberikan subsidi biaya sertifikasi, tetapi tidak menanggung sepenuhnya. "Sehingga negara dan pelaku usaha dalam posisi sama-sama melaksanakan kewajibannya sesuai UU JPH pasal 44," kata Raihani.

Pasal 44 UU JPH mengatur bahwa biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

■ ed: satria kartika yudha

Muktamar Tafsir Nasional Dorong Islam Moderat

● WILDA FIZRIYANI, MUHYIDDIN

Mahasiswa diharapkan terlibat dalam menyuarakan Islam moderat.

PROBOLINGGO — Muktamar Tafsir Nasional 2020 yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Nurul Jadid (Unuja), Probolinggo, Jawa Timur, menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya rekomendasi untuk mempromosikan Islam moderat.

Mengusung tema "Qur'an and Hadith Values in Promoting Moderate Islam", muktamar yang digelar pada 9-10 Januari 2020 ini menghadirkan tiga pemateri utama dan ratusan peserta dari berbagai wilayah. Adapun rekomendasi yang dihasilkan forum ini terbagi dalam lima kategori. "Bidang kajian dan intelektual, publikasi ilmiah, IT, bidang kerja sama, dan kemasyarakatan," kata Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Tafsir Nasional 2020 Ahmad Fawaid kepada *Republika*, Sabtu (11/1).

Pada bidang kajian dan intelektual, para peserta muktamar sepakat mempromosikan Islam moderat. Mereka setuju melaksanakannya dengan cara milenial dan kekinian sesuai kebutuhan kalangan pemuda.

Kesepakatan tersebut, menurut Fawaid, didasarkan pada telaah atas kinerja pengarusutamaan moderasi di Indonesia. Aspek ini dinilai cenderung serius dengan penggunaan ba-

hasa yang rumit. Karena itu, lembaganya ingin mengemas gagasan besar dari para tokoh nasional tersebut menjadi sesuatu yang "dekat" dengan para pemuda. "Misalnya teater, novel, dan bahkan komik. Tentu kerja-kerja ini mengikuti spirit yang tersirat di dalam Alquran," kata Fawaid.

Muktamirin juga mengecam tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Alquran sebagai dasar pembedaan. Menurut Fawaid, kekerasan yang dilakukan suatu kelompok merupakan bukti kegagalan dalam

memahami Alquran. Sebab, Alquran sesungguhnya kitab toleran yang dapat dipraktikkan di setiap zaman.

Muktamar yang dihadiri ratusan mahasiswa dari 28 perguruan tinggi itu juga menelurkan rekomendasi terkait publikasi ilmiah. Dalam hal ini, muktamirin menyetujui lahirnya publikasi ilmiah berupa jurnal maupun buku ringan, terutama terkait moderasi dan pengarusutamaannya bagi kalangan pemuda.

Melalui publikasi, kata Fawaid, seluruh mahasiswa dapat menawarkan gagasannya tentang Islam moderat berbasis Alquran. Hal ini penting, mengingat selama ini mahasiswa kerap dijadikan sasaran penguatan moderasi. Oleh karena itu, muktamirin berharap mahasiswa terlibat dalam menyuarakan Islam moderat.

Sementara, di bidang IT, mahasiswa diminta menyuarakan nilai-nilai moderasi melalui media sosial. Tujuannya mengimbangi gagasan ekstremisme yang belakangan marak di dunia maya. "Apalagi, para pengguna media sosial saat ini telah dikuasai para pemuda," ujar Fawaid.

Muktamar Tafsir Nasional juga menghasilkan rekomendasi perihal bidang kerja sama. Terkait hal ini, mahasiswa program studi ilmu Alquran dan tafsir se-Indonesia berkomitmen menyelenggarakan muktamar kedua. Adapun kampus yang akan menjadi lokasi muktamar akan ditentukan kemudian.

Selain pelaksanaan Muktamar Tafsir Nasional ke-2, disepakati pula adanya kerja sama antarkampus dalam hal informasi, terutama informasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan kegiatan. Muktamirin juga menyepakati kerja sama dalam hal pertukaran mahasiswa antarkampus.

"Lalu pada bidang kemasyarakatan, muktamirin sepakat melakukan pendampingan, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat tentang isu-isu aktual," ujarnya.

Perlu sinergi

Salah satu pembicara muktamar, Prof Abdul Mustaqim, mengatakan, untuk menghasilkan tafsir Alquran dan hadis yang mengedepankan moderasi, diperlukan adanya sinergitas

antara berbagai pihak.

"Menurut hemat saya, perlu membangun sinergitas program atau kegiatan yang bisa mempertemukan para akademisi, termasuk tentunya dosen para mubaligh, dai, termasuk kalangan pesantren untuk merumuskan konsep dakwah yang mengacu pada nilai-nilai moderasi," ujar Mustaqim saat diwawancarai *Republika*, Ahad (12/1).

Guru besar Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, itu menjelaskan, moderasi merupakan karakter dasar Islam, yakni ber-

ada di tengah-tengah. Menurut dia, Pancasila itu sejatinya juga bagian dari bentuk moderasi. Karena itu, ia menilai, sudah tepat Indonesia memilih Pancasila dalam konteks relasi antara agama dan negara.

"Jadi, Indonesia ini bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler. Cuma agama memberi peran, nilai di dalam tata kelola kenegaraan. Dan Pancasila tidak harus dipertentangkan dengan Alquran dan hadis. Karena intinya itu sudah sejalan dengan prinsip dasar Alquran dan hadis," jelasnya.

Saat menjadi pembicara dalam muktamar tersebut, Mustaqim juga menawarkan sebuah metodologi untuk memahami dan menafsirkan Alquran dan hadis secara moderat, yaitu tafsir Maqashidi.

"Tafsir Maqashidi itu adalah sebuah pendekatan tafsir yang mencoba menengahi dua ketegangan epistemologi tafsir antara yang tekstualis dengan yang liberalis," ucap pengasuh Pesantren Lingkar Studi Quran (LSQ) Arrahmah, Yogyakarta, ini.

Menurut dia, tafsir Maqashidi ini sebagai basis dari moderasi Islam. Karena, di satu sisi, tafsir Maqashidi tetap menghargai teks, tetapi di sisi lain juga akan menangkap makna di balik teks tersebut.

"Kemudian, melakukan kontekstualisasi, sehingga kita bisa meraih dimensi moderasi di dalam menerapkan nilai-nilai Alquran dan hadis dalam konteks keindonesiaan yang sangat multiagama, multietnis, dan sebagainya," kata ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

■ ed: wachidah handasah

Agama Harus Jadi Landasan Pemecahan Masalah

JAKARTA — Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, agama harus dimerdekakan dari jerat posisi sebagai sumber masalah. Agama, menurut dia, harus dikembalikan kepada tujuan hakiki sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menekankan, dialog antaragama tidak boleh lagi hanya berupa tukar-menukar kata-kata manis dari kitab suci dan pernyataan tokoh-tokoh suci.

“Sudah terlalu lama umat manusia menunggu para tokoh agama bicara sejujur-jujurnya tentang masalah-masalah yang nyata-nyata sedang menimpa umat manusia dewasa ini, termasuk permusuhan dan konflik yang bengis di antara kelompok-kelompok berbeda agama,” ujar tokoh NU yang akrab disapa Gus Yahya ini.

Ia menjelaskan, pada hakikatnya agama diturunkan sebagai anugerah Tuhan untuk menolong umat manusia dalam mencari jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Namun, karena kelemahan dalam sifat dasar manusia, agama dalam perjalanan sejarahnya kemudian direduksi oleh para pemeluknya menjadi sekadar identitas kelompok dan dijadikan alasan untuk bersaing dan bertarung melawan kelompok yang dianggap berbeda identitasnya.

“Pada titik itulah, agama menjadi sumber konflik. Sebab itu, kita harus memerdikakan agama dari jerat posisi sebagai sumber masalah dan mengembalikannya kepada tujuan hakiki sebagai landasan untuk memecahkan masalah,” ujar dia.

Gus Yahya dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Agama-agama Ibrahim di Vatikan, 14-17 Januari 2020.

Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, Gus Yahya menjadi salah satu dari enam tokoh wakil dunia Islam yang diundang untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang gerakan bersama bagi perdamaian dunia.

“Sebenarnya, ini undangan kedua ke Vatikan sejak saya bertemu Paus pada September tahun lalu. Bulan Oktober tahun lalu, saya juga diundang ke Vatikan untuk mengikuti konvensi tentang eutanasia, tapi saya berhalangan hadir karena terikat tugas di Tanah Air. Kali ini, saya harus hadir karena agendanya luar biasa penting,” ujar Gus Yahya melalui keterangan tertulis yang diterima *Republika*, Ahad (12/1).

Dijelaskan, pertemuan kali ini diinisiasi oleh Multi-Faith Neighbours Network (Jaringan Tetangga Lintas Agama), yakni sebuah organisasi AS yang diawaki Mohamed Magid, imam eksekutif All Dulles Area Muslim Society Center (Pusat Komunitas Muslim Wilayah Dulles) di Sterling, Virginia, AS.

Selain itu, hadir pula Pastor Bob Roberts (pendiri Gereja Northwood di Keller, Texas, AS) dan Rabbi David Saperstein (Presiden World Union for Progressive Judaism atau Perserikatan Yahudi Progresif Seluruh Dunia).

Dalam forum tersebut, Gus Yahya akan membawa wawasan-wawasan tentang cita-cita peradaban mulia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, beserta rencana-rencana strategis yang telah dibangun di lingkungan NU, seperti Deklarasi Nahdlatul Ulama ISOMIL (2016), Deklarasi Global Unity Forum I GP Ansor (2016), Deklarasi GP Ansor tentang Humanitarian Islam (2017), Manifesto Nusantara GP Ansor (2018), dan hasil-hasil Munas Alim Ulama NU di Kota Banjar (2019).

■ ed: wachidah handasah

Pengusaha Ogah Biayai UMK

● IIT SEPTYANINGSIH

Pemerintah disarankan mengalihkan anggaran subsidi.

JAKARTA — Kalangan pengusaha tak ingin dibebankan atas rencana pemerintah menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Biaya sertifikasi disarankan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Kementerian dan lembaga terkait pada pertengahan pekan lalu sepakat berencana menggratiskan biaya sertifikasi halal untuk UMK seiring telah berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal gratis hanya berlaku bagi UMK sektor makanan dan minuman dengan omzet maksimal Rp 1 miliar per tahun.

Kendati demikian, pemerintah belum menentukan skema pendanaannya. Berbagai usulan pun bermunculan dari sejumlah pihak. Ada yang mengusulkan subsidi silang dari pengusaha besar dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) untuk dialokasikan kepada UMK.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan,

subsidi silang untuk menggratiskan sertifikasi halal pelaku UMK tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, UU Jaminan Produk Halal merupakan program pemerintah.

"Memangnya swasta itu negara? Ini kan kewajiban negara. Jadi, *enggak* mungkin ada subsidi silang," kata Hariyadi kepada *Republika*, Ahad (12/1).

Ia menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal UMK lewat dana CSR perusahaan besar juga tidak bisa dilakukan. "Tidak mungkin dan kita juga tidak mau," ujarnya.

Hariyadi menyarankan pemerintah kembali menjadikan sertifikasi halal agar bersifat sukarela, bukan kewajiban. Dengan begitu, ketika pelaku usaha menyatakan produknya halal, hal itu perlu dibuktikan dengan sertifikat halal. Sebaliknya, bila pengusaha tidak merasa perlu sertifikat halal, dia tidak berkewajiban mengajukannya.

"Ketika UU JPH disahkan dan sertifikat halal diwajibkan, pada akhirnya secara teknis bermasalah karena prosesnya panjang, sementara auditor terbatas. Kita sudah sampaikan isu ini sejak awal. Antrean (sertifikasi halal) akan panjang sekali, lalu UKM siapa yang biayai? Siapa yang mau *nanggung*?" katanya.

Ketua Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat (Japnas Jabar) Iwan Gunawan menyarankan pemerintah mengalokasikan dana untuk menggratiskan serti-

fikasi halal UMK dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Banyak instrumen yang bisa dipakai, bisa dari APBN, salah satunya alokasi dari dana subsidi BBM," ujar dia.

Menurut dia, pemberian insentif kepada UMK merupakan kewajiban pemerintah. Maka, kementerian dan lembaga bisa pula saling bekerja sama, misalnya Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Koperasi (Menkop) dan UKM.

Senada dengan Apindo, ia menilai skema pendanaan subsidi silang pengusaha besar ke UMK kemungkinan tak bisa dilakukan. Alasannya, jumlah pengusaha besar cukup terbatas, sementara jumlah pelaku UMK amat banyak. "Jumlah pengusaha besar berbanding terbalik dengan UMK. Perlu diketahui, 99 persen pengusaha di Indonesia itu usaha kecil," katanya.

Meski tarif sertifikat halal bagi pengusaha besar dinaikkan, menurut dia, hal itu tetap tidak bisa memberikan insentif kepada pelaku usaha kecil. "Kalau semua pengusaha sudah biayai UMK, lalu siapa yang biayai UMK lain selanjutnya? Sebab, secara jumlah jomplang," kata Iwan.

Meski begitu, kata dia, Japnas Jabar merespons positif kebijakan sertifikasi halal gratis bagi UMK. Baginya, hal ini akan mengakselerasi kesadaran kewajiban produk halal di tingkat produsen maupun masyarakat luas. ■ **ed:** satria kartika yudha

Terkait Kekerasan Anak Kemenag akan Kebut Pembuatan Aturannya

JAKARTA (Pos Kota) - Kementerian Agama (Kemenag) akan kebut lahirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama.

"Kemenag akan menargetkan dalam waktu satu bulan PMA tersebut selesai, sehingga dapat segera disosialisasikan, terang Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, di Jakarta, Minggu (12/1).

Ia menambahkan PMA yang akan diterbitkan ini, terkait instruksi Presiden Jokowi sebelumnya agar jajaran kementerian untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

"Penerbitan PMA tersebut sifatnya sangat mendesak mengingat sampai saat

ini di lingkungan Kemenag belum ada regulasi yang mengatur masalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak," ucap Zainut.

Menurut dia, kasus kekerasan terhadap anak setiap bulan frekuensinya semakin meningkat. Sehingga diharapkan PMA tersebut dapat memberikan panduan kepada para guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

3 MASALAH

PMA tersebut akan memuat tiga masalah. Pertama, mengoptimalkan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Kedua, membuat sistem layanan pengaduan terkait

kasus-kasus anak. Ketiga, membangun sistem manajemen informasi penanganan kasus anak menuju penanganan yang lebih komprehensif.

Ia menjelaskan PMA nantinya akan lebih memprioritaskan pada aspek pencegahan. Aksi pencegahan dilakukan dengan berbagai model kampanye, model-model sosialisasi dan edukasi publik, yang bukan hanya menarik tapi memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak.

"Presiden sangat berkomitmen untuk terus mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap masalah kekerasan anak, agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter." (johara/bi)